

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN
DAN INFRASTRUKTUR TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**



Skripsi Oleh :

PUTRI INDAH SARI

01021381419173

Ekonomi Pembangunan

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2018

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
PALEMBANG

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF
PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN DAN
INFRASTRUKTUR TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Disusun oleh:

Nama : Putri Indah Sari
NIM : 01021381419173
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian : Keuangan Daerah

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

TANGGAL PERSETUJUAN

DOSEN PEMBIMBING

Tanggal : 14 Februari 2018

Ketua : Drs. H. Bambang Bemby S, M.A., Ph.D


NIP. 195306161980111004



Tanggal : 27 Februari 2018

Anggota : Mukhlis, S.E., M.Si

NIP. 197304062010121001



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN DAN
INFRASTRUKTUR TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Disusun Oleh :

Nama : Putri Indah Sari
NIM : 01021381419173
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Keuangan Daerah

Telah di uji dalam ujian Komprehensif pada tanggal 9 Maret 2018 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif

Palembang, 9 Maret 2018

Ketua

Anggota,

Anggota



Drs. H. Bambang Bemby S., M.A., Ph.D
NIP. 195306161980111004



Mukhlis, S.E., M.Si.
NIP. 197304062010121001



Imelda, S.E., M.S.E
NIP. 197703092009122002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Suhel, M.Si
NIP. 196610141992031003

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Disusun oleh:

Nama : Putri Indah Sari
NIM : 01021381419173
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian : Keuangan Daerah
Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “ Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Infrastruktur Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan”

Pembimbing :

Ketua : Drs. H. Bambang Bemby S, M.A., Ph.D

Anggota : Mukhlis, S.E., M. Si.

Tanggal diuji : 9 Maret 2018

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikialah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Palembang, 21 Maret 2018

Pembuat Pernyataan




Putri Indah Sari

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Infrastruktur Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan”. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas mengenai sejauh mana pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan infrastruktur terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, doa, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak.

Palembang, Maret 2018

Putri Indah Sari

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Infrastruktur Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan”. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Bambang Bemby S, M.A., Ph.D dan Bapak Mukhlis, S.E., M.Si yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr.Suhel,M.Si Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr.Imam Asngari,SE.,M.Si Sekertaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Dosen penguji yang telah membantu memberikan kritik dan saran
5. Kedua Orangtuaku, kedua kakakku, dan segenap keluarga yang selalu memberikan dukungan, motivasi serta doa sehingga selalu diberi kemudahan dalam berbagai urusan.
6. Segenap dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Palembang, staff karyawan, dan petugas perpustakaan, terimakasih atas ilmu selama ini
7. Sahabat terbaikku dan teman-teman Ekonomi Pembangunan 2014 yang selalu memberikan dorongan semangat, dan segala motivasi yang tak pernah berhenti mengalir kepada penulis.

ABSTRAK

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN DAN INFRASTRUKTUR TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Oleh


Putri Indah Sari; Bambang Bemby S; Mukhlis

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan pada program sekolah gratis dan infrastruktur jalan dan jembatan terhadap tingkat kemiskinan di 15 Kabupaten/Kota Sumatera Selatan. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data panel yang merupakan kombinasi dari data *time series* dan *cross section* dari tahun 2010-2016. Model dalam penelitian ini diestimasi dengan alat analisis regresi linier berganda dengan data panel yang menggunakan metode *Fixed Effect Model*. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan infrastruktur berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan. Nilai R^2 yang didapat dalam penelitian ini yaitu sebesar 0.939755 yang artinya 93.9% variabel tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan infrastruktur yang ada pada model, sedangkan sisanya 6.1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model.

Kata Kunci : *Pengeluaran Pemerintah, Pendidikan, Infrastruktur, Tingkat Kemiskinan.*

Ketua

Anggota



Drs. H. Bambang Bemby S, M.A., Ph.D

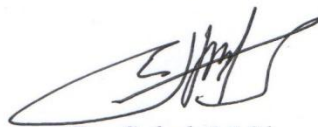
NIP. 19530616198011100



Mukhlis, S.E., M.Si

NIP. 197304062010121001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Suhel, M.Si
NIP. 19661014199203100

ABSTRACT

EFFECT OF GOVERNMENT SPENDING IN EDUCATION AND INFRASTRUCTURE ON THE LEVEL OF POVERTY IN DISTRICT / CITY OF SOUTH SUMATERA PROVINCE

By:

Putri Indah Sari; Bambang Bemby S; Mukhlis

The purpose of this study was to determine and analyze the effect of government spending in education of free school program and road and bridge infrastructure on the poverty levels in 15 districts / cities in South Sumatera. In this study, using a quantitative approach. The data used were the panel which were a combination of time series and cross section of the period of 2010 to 2016. The model in this study was estimated by means of multiple linear regression analysis with panel data using Fixed Effect Model. The results of the analysis of this study showed that government spending on education and infrastructure had a significant negative effect on the poverty levels in South Sumatera. R^2 value obtained in this study was 0.939755, which means 93.9% of poverty level variables influenced by government spending variables in education and infrastructure that exist in the model, while the remaining 6.1% influenced by other factors outside the model.

Keyword: *Government Spending, Education, Infrastructure, Poverty Level.*

First Advisor



Drs. H. Bambang Bemby S, M.A., Ph.D

NIP. 19530616198011100

Member



Mukhlis, S.E., M.Si

NIP. 197304062010121001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	: Putri Indah Sari
	NIM	: 01021381419173
	Tempat, Tanggal Lahir	: Palembang, 5 Oktober 1996
	Alamat	: Jl. Amd Talang Jambe No. 151 RT 015 RW 04, Sukarami, Palembang
	Handphone	: +6285267560940
AGAMA	: Islam	
JENIS KELAMIN	: Perempuan	
STATUS	: Belum Menikah	
KEWARGANEGARAAN	: Indonesia	
TINGGI	: 160 cm	
BERAT BADAN	: 58 kg	
KEGEMARAN	: Membaca	
EMAIL	: sputriindah@yahoo.co.id	
PENDIDIKAN		
2001-2002	TK Handayani Palembang	
2002-2008	SD Negeri 156 Palembang	
2008-2011	SMP Negeri 11 Palembang	
2011-2014	SMA Muhammadiyah 1 Palembang	
2014-2018	Fakultas Ekonomi, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Sriwijaya	

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Permasalahan	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Kebijakan Fiskal	10
2.1.2 Teori Pngeluaran Pemerintah.....	11
2.1.3 Model Pembangunan tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah	12
2.1.4 Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah	13
2.1.5 Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan	14
2.1.6 Pengeluaran Pemerintah Bidang Infrastruktur.....	15

2.1.7 Teori Kemiskinan	16
2.2 Penelitian Terdahulu	20
2.3 Kerangka Pemikiran	25
2.4 Hipotesis	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Ruang Lingkup	28
3.2 Jenis dan Sumber Data	29
3.3 Metode Pengumpulan Data	29
3.4. Definisi Operasional Variabel	30
3.5 Teknik Analisis	31
3.5.1 Pemilihan Model Terbaik	32
3.4.1.1 Uji Chow	33
3.4.1.2 Uji Hausman	33
3.5.2 Uji Statistik	34
3.5.2.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)	34
3.5.2.2 Uji Signifikansi Individual (Uji t)	36
3.5.2.3 Koefisien Determinasi (R^2)	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian	39
4.1.1 Keuangan Daerah	38
4.1.2 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan.....	41
4.1.3 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Bidang Infrastruktur	44
4.1.4 Kondisi Penduduk Provinsi Sumatera Selatan.....	52
4.1.5 Perkembangan Penduduk Miskin di Sumatera Selatan	55
4.2 Hasil Estimasi Regresi Data Panel	57
4.2.1 Pengujian Signifikansi	57

4.2.1.1 Uji Chow (<i>Redundant Fixed Effect</i>)	57
4.2.1.2 Uji Hausman	58
4.2.1.3 Pemilihan Metode Estimasi Data Panel	59
4.2.2 Uji Statistik	63
4.2.2.1 Uji F	63
4.2.2.2 Uji t	64
4.2.2.3 Koefisien Detrminasi (R^2)	64
4.3 Pembahasan	65
4.3.1 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan dan Infrastruktur terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Selatan	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	70
5.1 Kesimpulan	70
5.2 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	77

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Pengeluaran Pemerintah Pada Program Sekolah Gratis Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010-2016 (Juta Rupiah)	43
Tabel 4.2. Pengeluaran Pemerintah Bidang Infrastruktur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010-2016 (Juta Rupiah)	47
Tabel 4.3 Program/Kegiatan dan Persentase Anggaran Infrastruktur Jalan dan Jembatan Provinsi Sumatera Selatan (%)	51
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Sumatera Selatan	54
Tabel 4.5. Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Selatan Tahun 2010-2016	56
Tabel 4.6 Hasil Estimasi dengan Menggunakan <i>Fixed Effect Model</i>	59
Tabel 4.7 Model Regresi Perkabupaten /kota Sumatera Selatan	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Penduduk Miskin Sepuluh Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2016 (dalam persen)	3
Gambar 1.2. Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010-2016 (dalam persen)	4
Gambar 1.3. Jumlah Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Infrastruktur di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010-2016 (juta rupiah)	7
Gambar 2.1. Lingkaran Setan Kemiskinan (<i>Vicious Circle of Poverty</i>)	19
Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran	27
Gambar 3.1. Uji signifikan F	35
Gambar 3.2. Daerah kritis dan penerimaan suatu hipotesis	37
Gambar 4.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan (Milyar Rupiah)	40
Gambar 4.2 Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Sumatera Selatan Tahun 2010-2016	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan (Milyar Rupiah)	77
Lampiran 2. Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Sumatera Selatan Tahun 2010-2016 (Jiwa)	78
Lampiran 3. Hasil Estimasi Regresi Data Panel	79
Lampiran 4. Hasil Estimasi Uji Chow	82
Lampiran 5. Hasil Estimasi Uji Hausman	82
Lampiran 6. Hasil Estimasi Uji t	82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

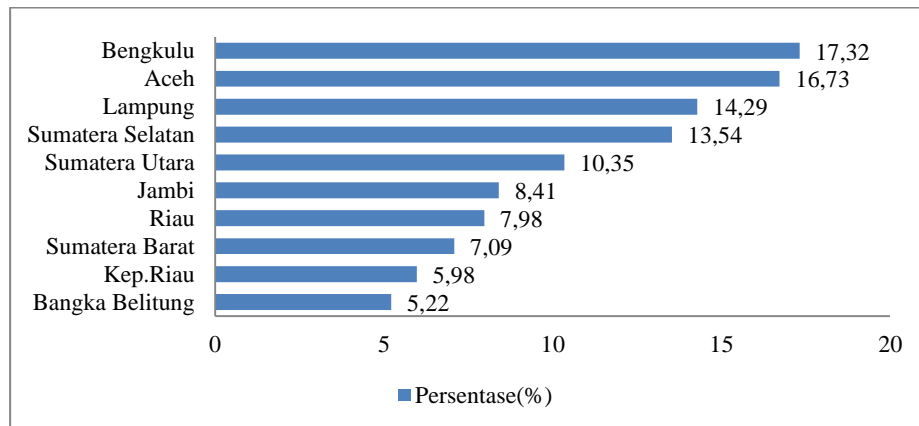
Kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi pada banyak negara di dunia. Hampir semua negara yang berkembang memiliki masalah kemiskinan, khususnya di Indonesia yang masih merupakan Negara Sedang Berkembang (NSB). Dalam melihat ukuran kemiskinan, Badan Pusat Statistik (2010) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dalam pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Kemiskinan dipengaruhi oleh banyak faktor yang dapat dilihat dari berbagai dimensi, di dalamnya antara lain mencakup dimensi rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, tidak adanya jaminan masa depan, kerentanan (*vulnerability*), ketidakberdayaan, ketidakmampuan menyalurkan aspirasi, dan ketertinggalan dalam peranan sosial (Mawardi dan Sudarno, 2003).

Beberapa negara yang tergabung dalam anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) termasuk Indonesia berkomitmen untuk mengatasi persoalan kemiskinan sejalan dengan Deklarasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*). Hal ini berarti Indonesia juga dituntut untuk mewujudkan target-target dalam Deklarasi PBB tersebut, dimana pengentasan kemiskinan sendiri merupakan tujuan utama dalam pembangunan yang berkelanjutan (Ishartono dan Raharjo, 2016). Kemiskinan merupakan masalah

multidimensional, maka upaya pengentasan kemiskinan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Dengan diterapkannya otonomi daerah di Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah diberi wewenang dalam merancang dan melaksanakan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerahnya.

Pemerintah pusat mengharapkan dengan pelimpahan wewenang dalam pengambilan keputusan dan tanggung jawab maka pemerintah daerah mempunyai peluang dan kesempatan yang lebih besar dalam menanggulangi kemiskinan. Peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dituntut lebih besar dalam rangka pengentasan kemiskinan agar supaya program dan strategi yang dikembangkan tepat sasaran hal ini dikarenakan pemerintah daerah mengetahui betul karakteristik daerahnya (Saragih, 2003).

Permasalahan kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan yaitu masih tingginya angka kemiskinan jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Sumatera, dan menjadi peringkat keempat dengan persentase 13,54 persen. Oleh karena itu, kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, terutama bagi pemerintah daerah untuk menyangga proses perbaikan kehidupan masyarakat dalam sebuah pemerintahan, untuk segera mencari solusi untuk menanggulangi angka kemiskinan yang cukup tinggi.

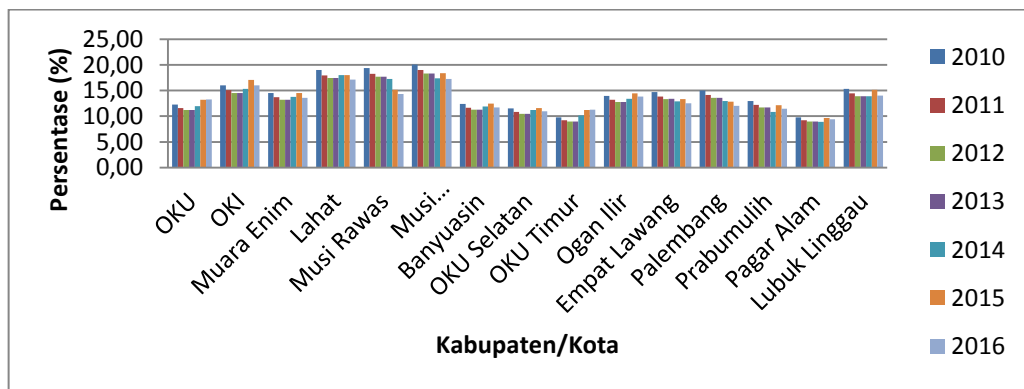


Gambar 1.1 Penduduk Miskin Sepuluh Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2016 (dalam persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik, Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Sumatera Selatan 2016

Tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan sebagian besar masih tinggi dan di atas rata-rata nasional. Penyebab masalah tingginya tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan disebabkan salah satunya oleh rendahnya tingkat pendidikan dan keterbatasan akses masyarakat miskin di desa terhadap infrastruktur publik. Penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*viscious circle of poverty*). Teori ini ditemukan oleh Ragnar Nurkse dalam Kuncoro (2004). Adanya keterbelakangan dan kurangnya modal pada masyarakat miskin menyebabkan rendahnya produktivitas sehingga mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Implikasinya pada rendahnya tabungan dan investasi yang berakibat pada keterbelakangan dalam hal kualitas sumber daya manusia mereka dan seterusnya. Setiap usaha untuk mengurangi kemiskinan seharusnya diarahkan untuk memotong lingkaran dan perangkat kemiskinan ini. Pemerintah daerah perlu melakukan kebijakan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat miskin (*pro poor*) melalui program-

program pengurangan kemiskinan dengan prioritas di sektor pendidikan dan infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pada periode akhir tahun 2016 persentase penduduk miskin di seluruh kabupaten/kota cenderung mengalami penurunan lebih dari satu persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan total persentase sebesar 13,54 persen. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif terhadap upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan.



Gambar 1.2. Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010-2016 (dalam persen)

Sumber : Badan Pusat Statistik, Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Sumatera Selatan 2016

Todaro dan Smith (2011) menyatakan bahwa melalui anggaran pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan tingkat pendapatan riil orang-orang miskin dengan melalui kebijakan publik secara langsung seperti program bantuan tunai bersyarat atau tanpa syarat, ataupun secara tidak langsung melalui perluasan akses pendidikan dasar, infrastruktur dan perawatan kesehatan.

Pendidikan merupakan hal yang penting dalam pembentukan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tingginya keterampilan dan

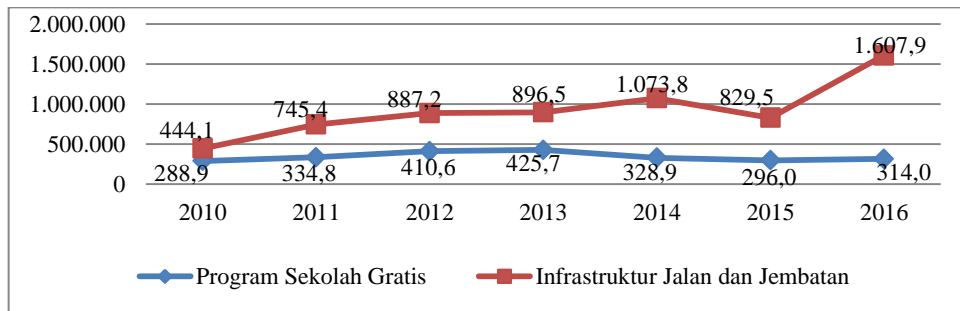
pengetahuan masyarakat serta tingginya tingkat pendidikan masyarakat adalah modal penting masyarakat untuk memperoleh kesempatan kerja yang lebih baik serta dalam upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Secara umum tingkat pendidikan di Sumatera Selatan masih belum merata dan masih rendahnya tingkat pendidikan yang dapat dilihat dari angka partisipasi sekolah yang cenderung menurun sejalan dengan peningkatan umur penduduk Sumatera Selatan, hal ini menunjukkan keterbatasan akses masyarakat pada jenjang pendidikan yang tinggi. Sedangkan tingkat pendidikan tinggi masih didominasi oleh kota seperti yang ditemui di Kota Palembang, Prabumulih dan Lubuklinggau (Bappenas, 2015). Perlunya kebijakan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan yang diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat pada pendidikan yang baik dan murah. Sejalan dengan hal tersebut, salah satu program Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkaitan dengan kebijakan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan adalah Program Sekolah Gratis (PSG) yang dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota secara merata dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 31 Tahun 2009. Pelaksanaan program sekolah gratis oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ini dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan. Pada akhirnya diharapkan dapat menjangkau masyarakat miskin yang terbatas kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar pendidikan agar dapat menikmati pendidikan.

Pembangunan infrastruktur mempunyai pengaruh yang sangat besar

terhadap pembangunan perekonomian daerah. Menurut Tim LPEM-PSEKP-PSP (2004) menyebutkan bahwa salah satu untuk menanggulangi kemiskinan yang cukup efektif adalah pembangunan infrastruktur. Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu faktor pendorong produktivitas daerah. Keberadaan infrastruktur seperti jalan raya dan jembatan mampu membuka akses bagi masyarakat dalam melaksanakan aktivitas ekonomi. Pembangunan infrastruktur berkontribusi pada penyediaan lapangan pekerjaan untuk mengurangi angka kemiskinan terutama pembangunan pada infrastruktur jalan akses penghubung antar desa guna menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Hal ini sejalan dengan Program Nawacita Presiden Republik Indonesia yang menekankan pada percepatan pembangunan infrastruktur yang menjangkau pemerataan infrastruktur antar wilayah terutama pembangunan dari daerah terpencil dan perbatasan.

Pembangunan infrastruktur di Sumatera Selatan masih belum cukup merata di sejumlah wilayah kabupaten/kota, mengingat masih terpusatnya pembangunan infrastruktur di ibukota-ibukota kabupaten/kota semata. Kondisi infrastruktur terutama akses jalan di beberapa wilayah kabupaten dengan kondisi jalan yang rusak perlu adanya perhatian serius dari pemerintah. Infrastruktur jalan dan jembatan merupakan akses penting untuk masyarakat guna mendorong ekonomi masyarakat daerah. Perlunya pembangunan infrastruktur yang merata di setiap wilayah terutama pembangunan infrastruktur desa dapat meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan di wilayah perdesaan. Kegiatan ekonomi di pedesaan menjadi lancar, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan

masyarakat. Pemerintah Sumatera Selatan perlu berupaya melaksanakan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan dengan alokasi anggaran yang memadai.



Gambar 1.3. Jumlah Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Infrastruktur di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010-2016 (juta rupiah)

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Dinas Pendidikan Nasional Sumatera Selatan 2010-2016

Pada Gambar 1.3 menunjukkan perkembangan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan infrastruktur di Provinsi Sumatera Selatan tujuh tahun terakhir yang selalu mengalami fluktuasi. Dengan memperhatikan gambar tersebut dapat diketahui bahwa proporsi pengeluaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di bidang infrastruktur merupakan proporsi terbesar jika dibandingkan dengan proporsi pengeluaran di bidang Pendidikan. Jumlah pengeluaran pemerintah di bidang infrastruktur terbesar ditunjukkan pada tahun 2016 sebesar 1,607 triliun rupiah yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 829,51 milyar rupiah di tahun 2015. Hal ini sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2018 dengan adanya percepatan infrastruktur sehingga pemerintah mengalokasikan anggaran bidang infrastruktur yang lebih besar (Bappeda, 2016). Untuk anggaran pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terus

mengalami peningkatan kecuali di tahun 2014 anggaran pendidikan mengalami penurunan dan terjadi peningkatan kembali di tahun 2016 sebesar 314,03 milyar rupiah.

Merujuk pada penjelasan terdahulu dapat dikatakan bahwa tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan disebabkan oleh beberapa faktor seperti rendahnya tingkat pendidikan dan keterbatasan akses masyarakat pada infrastruktur (Bappenas, 2015). Oleh karena itu, perlu adanya perhatian pemerintah terhadap pengurangan tingkat kemiskinan melalui kebijakan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan infrastruktur. Dengan adanya pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan infrastruktur tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka dibutuhkan kajian lebih lanjut untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan infrastruktur terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang dapat dirumuskan masalahnya adalah “bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan Infrastruktur terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yaitu “mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah bidang dan Infrastruktur terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan”.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan manfaat sebagai pemberitahuan dan tambahan informasi kepada pembaca dan masyarakat mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan infrastruktur di Sumatera Selatan

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penelitian ini.

a) Sebagai tambahan informasi untuk pemerintah dalam kebijakan pengalokasian dana di bidang pendidikan dan infrastruktur di Sumatera Selatan

b) Sebagai bahan pertimbangan untuk analisis dan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajija, Shochrul R *et al.* 2011. *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Jakarta: Salemba Empat
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. 2010. *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2010*. BPS: Jakarta
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. 2014. *Sumatera Selatan dalam Angka* . BPS: Jakarta
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. 2016. *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2016*. BPS: Jakarta
- Bahalau, Y., dan Siwu, H. 2015. Analisis Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Upaya Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara Periode 1994-2013. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, <https://ejournal.unsrat.ac.id>. Diakses pada 10 Februari 2017
- Bahri, Syaiful, 2008, Pengaruh Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan (Tesis). Program Studi Ilmu Ekonomi Bidang Kajian Utama Perencanaan SDM, Universitas Sriwijaya, tidak dipublikasikan
- Balitbangnovda. 2015. *Evalusi Program Sekolah Gratis*. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan: Palembang
- Bappeda. 2016. *Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2016*. Bappeda: Palembang
- Bappenas. 2015. *Seri Analisis Pembangunan wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015*. Bappenas: Jakarta
- Catur, Fatin, 2008, Kemiskinan Dan Pengeluaran Pemerintah Untuk Infrastruktur: Studi Kasus Indonesia, 1976-2006. Bogor. Skripsi
- Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga. 2016. Laporan Tahunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Provinsi Sumatera Selatan , Palembang
- Dinas Pendidikan Nasional Sumatera Selatan. 2016. Laporan Tahunan Sekolah Gratis Provinsi Sumatera Selatan, Palembang
- Direktorat Jederal Perimbangan Keuangan. 2016. *Data Anggaran Pengeluaran Pemerintah (Urusan) TA 2010 – 2015*. (<http://www.djpk.depkeu.go.id/>)
- Direktorat Jederal Perimbangan Keuangan. 2017. *Data Anggaran Pengeluaran Pemerintah (Urusan) TA 2017*. (<http://www.djpk.depkeu.go.id/>)

- Dumairy. 2002. *Perekonomian Indonesia*. Erlangga. Jakarta
- Fan, *et al.* 2000. Government Spending, Growth and Poverty in Rural India. *American Journal of Agricultural Economics*, 82 (4), 1038-1051
- Fan, *et al.* 2004. Government Spending and Poverty Reduction In Vietnam. Project report prepared for the World Bank funded project pro-poor spending in Vietnam. Washington, D.C.: *International Food Policy Research Institute and Central Institute for Economic Management*. Diakses 15 Januari 2017
- Friawan, Deni. 2008. Kondisi Pembangunan Infrastruktur di Indonesia. *CSIS Vol.37. No.2 Juni 2008*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta
- Gujarati, Damodar N, 2003. *Basic Econometrics 4th* ed. McGraw-Hill International Editions
- Ishartono, dan Raharjo, Santoso, 2016. Sustainable Development Goals dan Kemiskinan. *Social Work Jurnal*, 6 (2), p.160-163
- Jonaidi, Arius, 2012. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*. <https://ejournal.unp.ac.id>. Diakses pada 10 februari 2017
- Kartasamita, Ginandjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat; Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta. CIDES
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 2016. Program Nawacita Presiden Republik Indonesia Dua Tahun Kerja Nyata Jokowi-JK. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Jakarta
- Kuncoro, Mudrajad, 1995. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. UPP AMP YKPN.
- Kuncoro, Mudrajad, 2004, *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perekonomian, Strategi dan Peluang*. Penerbit Erlangga. Jakarta
- Kuncoro, Mudrajad, 2010, *Masalah, Kebijakan dan Politik Ekonomika Pembangunan*. Erlangga. Jakarta
- Lustig, Nora, 2015, Income Redistribution and Poverty Reduction in Latin America: The role of social spending and taxation in achieving development goals, *Society for International Development*, <http://sidint.net/development/>. Diakses pada 15 Januari 2017
- Mangkoesebroto, Guritno, 2011, *Kebijakan Publik Indonesia Substansi dan Urgensi*. Gramedia Pustaka. Jakarta
- Mankiw, N. Gregory, 2008. *Teori Makro Ekonomi*. Erlangga. Jakarta

- Mawardi S. dan Sudarno S. 2003. *Kebijakan Publik yang Memihak Orang Miskin (Fokus: Pro-Poor Budgeting)*, Bahan Pelatihan SMERU
- Menteri Pekerjaan Umum. 2015. Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum 2010-2015, Jakarta
- Mubyarto, 2002, *Pemberdayaan ekonomi Rakyat dan Peranan Ilmu-Ilmu Sosial*, Aditya Media, Yogyakarta
- Nanga, Muana, 2005, Dampak transfer Fiskal Terhadap Kemiskinan di Indonesia: Suatu Analisis Simulasi Kebijakan (Disertasi). Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2005
- Nugroho, Sigit, 2007, *Dasar-Dasar Metode Statistika*. Grasindo. Jakarta
- Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan. 2014. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Palembang
- Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan. 2009. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Palembang
- Rasidin K, dan Bonar M. Sinaga, 2004. "Dampak Investasi Sumber Daya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia: Pendekatan Model Computable General Equilibrium: <http://ejournal.unud.ac.id.com/>. Diakses pada 10 Februari 2017
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Ghalia Indonesia
- Sasmal, Ritwik, 2014, Public Expenditure, Economic Growth and Poverty Alleviation, *International Journal of Social Economics*, <http://www.emeraldinsight.com/>. Diakses pada 10 Februari 2017
- Sharp, 1996. *Economics of Social Issues*, edisi ke 12, Richard D. Irwin, Chicago
- Soediyono, R, 2000, *Ekonomi Makro: Pengantar Analisis Pendapatan Nasional*, Liberty, Yogyakarta
- Soeparmoko, M, 2000, " *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek* ", BPFE, Yogyakarta
- Soeparmoko, M, 2003, " *Ekonomi Publik Untuk Keuangan Dan Pembangunan Daerah*, Edisi.1 ", Andi, Yogyakarta
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif dan RND*. Bandung: Alfabeta
- Sukarman, Marwa, Husin. 2016, Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah di Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemiskinan di

Provinsi Sumatera Selatan, *Jurnal Pembangunan Manusia* Vol 10 No.01 April 2016, hal 61-78

Sunusi, Dewi Kurniawati *et al.* 2014. Analisis Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah pada Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Sulawesi Utara Tahun 2001–2010. <https://ejournal.unsrat.ac.id>. Diakses pada 10 februari 2017

Supranto, 2008, *Statistik: Teori dan Aplikasi*. Erlangga. Jakarta

Suwardi, Akbar, 2011, Pengeluaran Pemerintah Daerah, Produktivitas Pertanian dan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, <http://jepi.fe.ui.ac.id>. Diakses pada 6 Februari 2017

Taylor and Jhon B. 2001. “The Circular Flow of Income and Expenditure,” *American Economic Review, Papers and Proceedings*. 2001

Tian, *et al.* 2003. Poverty Alleviation Role of Agriculture in China. *ROA/FAO, International Conference*, Italy, October 2003

Tim LPEM FEUI, 2000. “Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Perekonomian Antar daerah: Analisis Model IRIO”. Laporan Penelitian. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia, Jakarta

Tim LPEM-PSEKP-PSP. 2004. Studi Dampak Kebijakan Ekonomi Makro Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Indonesia: Infrastruktur dan Pengentasan Kemiskinan. Laporan Penelitian. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Universitas Indonesia, Jakarta

Todaro, Michael P. Dan Smith, S.C. 2011. *Pembangunan Ekonomi*. Tejemahan Agus Dharma (Edisi 11). Jakarta:Indonesia

Tresya, *et al.* 2014. Pengaruh Belanja Publik Di Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur terhadap Kemiskinan Di Provinsi Gorontalo. Naskah Publikasi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo. <http://eprints.ung.ac.id>. Diakses pada 10 Februari 2017

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23, Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 2014. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta

United Nation Development Programme. 2005. Decentralised Governance for Governance and Urban/Rural Development. *The Indonesia MDGs Report 2005*. (<http://undp.or.id/pubs/imdg2005/>)

Von, Braun, 2002, *Does Decentralization serve the Poor? In Managing Fiscal Decentralization*. E. Ahmad, and V. Tanzi. London and New York: Routledge

Wibowo Erhan, 2014, Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pertanian, Pendidikan, Kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi

Kasus Kab/Kota Jawa Tengah, Semarang, (Skripsi). Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, tidak dipublikasikan

Widarjono, Agus, 2007, *Ekonometrika Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ekonisia FE UII

Widiastuti, Ari, 2010, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Jawa Tengah (Skripsi). Program Sarjana Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, tidak dipublikasikan

World Bank. 1994. World Development Report 1994. *Infrastructure for Development*, Oxford University Press, New York.

World Bank. 2006. *Making the New Indonesia Work for the Poor*. The World Bank

World Bank. 2007. *Ikhtisar Kajian Pengeluaran Publik Indonesia: Memaksimalkan peluang Baru: Kajian Pengeluaran Publik Indonesia*. Februari

Zuluaga. 1990. Different Channels of Impact of Education on Poverty: An Analysis for Colombia. Preliminary Draft